

Determinan kemiskinan di Provinsi Jambi

Fran Ronald Banito*; M.Rachmad.R; Zulfanetti

Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Jambi

*E-mail korespondensi: ronaldbanito43@gmail.com

Abstract

Poverty is a global social problem, meaning that poverty is a problem that must be faced and a concern of many people. This study aims to analyze the development of poverty and the determinants of poverty in Jambi Province. This study uses a secondary data analysis method, and the data used is data from the Central Statistics Agency of Jambi Province. And the data used is the times series 2002-2019. This study uses multiple regression analysis with the level of poverty as the dependent variable, inflation, GRDP, Average Years of Schooling (RLS), Labor Force Participation Rate (TPAK), and Provincial Minimum Wage (UMP) as independent variables, and uses a dummy variable 1 Jambi Provincial government policies related to poverty reduction through the Jamkesda Program. The results of this study indicate that the development of the poverty rate in Jambi Province for the 2002-2019 period tends to decrease and that inflation, GRDP, RLS, UMP, and Dummy 1 (Jamkesda) have an effect significantly on the poverty rate in Jambi Province in the period 2002-2019.

Keywords: poverty, GRDP, average length of schooling, provincial minimum wage

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global, artinya kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kemiskinan serta determinan kemiskinan di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dan data yang digunakan adalah data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. dan data yang digunakan adalah times series tahun 2002-2019. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, inflasi, PDRB, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai variabel independen, serta menggunakan variabel dummy 1 kebijakan pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan penanggulangan kemiskinan melalui Program Jamkesda. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi periode 2002-2019 cenderung menurun dan dalam bahwa inflasi, PDRB, RLS, UMP dan Dummy 1 (Jamkesda) berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode tahun 2002-2019.

Kata kunci: kemiskinan, PDRB, rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi.

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan yang dihadapi setiap manusia, kemiskinan menyebabkan kualitas kehidupan seseorang yang terjerumus kesengsaraan hidup baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Fenomena ketimpangan pendapatan selalu menyertai persoalan kemiskinan karena kemiskinan disebabkan oleh adanya ketimpangan pendapatan (Yuliadi, 2007).

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global, artinya kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang. Sampai saat ini fenomena kemiskinan terjadi pada banyak negara di dunia. Menurut Tudaro & Smith (2006) kemiskinan masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang meskipun telah terjadi perbaikan-perbaikan kualitas dan kuantitas yang signifikan selama lebih dari separuh abad terakhir.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang belum dapat keluar dari masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan terasa sedemikian berat dan sulit sehingga seolah-olah tidak dapat diatasi. Menurut Basri dan Munandar (2009) sesungguhnya masalah ekonomi apapun dasarnya dapat diatasi apabila mengetahui akar permasalahan untuk segera diatasi.

Kemiskinan yang meluas merupakan tantangan terbesar dalam upaya melaksanakan proses pembangunan menuju tercapainya Produk Domestik Bruto tinggi dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi dengan pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti terhadap masyarakat miskin jika tidak diringi dengan penurunan yang signifikan dalam pendistribusian atau pemerataannya.

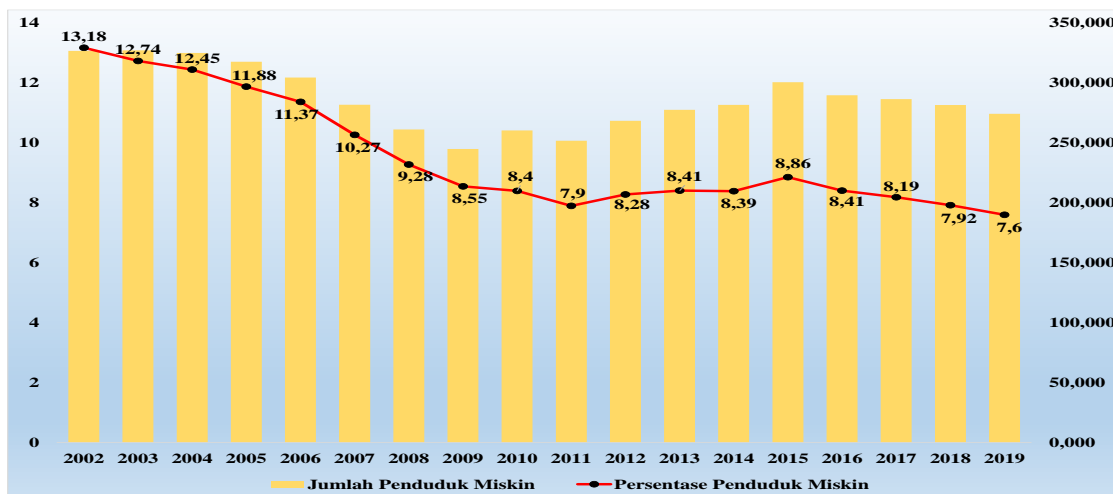
Kemiskinan timbul bisa karena faktor individual, kultural dan struktural. Persepsi individu tentang pentingnya upaya perbaikan kualitas hidup melalui peningkatan etos bekerja dan etos belanja pada sebagian masyarakat Indonesia masih lemah. Sehingga produktivitas manusia Indonesia secara umum relatif masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Faktor inilah menjadi penyebab utama banyaknya jumlah penduduk miskin Indonesia. Menanamkan etos kerja efisiensi, produktivitas, kreativitas dan semangat berwiraswasta pada masyarakat Indonesia merupakan langkah strategis mengatasi kemiskinan yang kronis di Indonesia (Yuliadi,2007).

Pada Gambar 1 dibawah ini memperlihatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi berjumlah 329.000 jiwa dan pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi berjumlah 274.320 jiwa. Dalam kurun waktu tujuh belas tahun terjadi penurun jumlah penduduk miskin sebanyak 52.580 jiwa dengan prosentase penurunan setiap tahunnya sebanyak 3.093 jiwa atau 0,06%.

Melihat penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2002-2013 relatif kecil tentu hal ini menjadi tantangan untuk pemerintah Provinsi Jambi mencari strategi dan upaya lain yang lebih efektif dan efisien dalam menekan tinggi angka penduduk miskin di Provinsi Jambi. Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Merangin dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 42.100 jiwa dan terendah berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22.300 jiwa.

Untuk tahun 2019 jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kota Jambi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 48.950 jiwa dan jumlah penduduk miskin terkecil berada pada Kota Sungai Penuh sebanyak 2.550 jiwa. Dari kondisi diatas terlihat pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di Kota Jambi merupakan jumlah penduduk miskin terkecil di Provinsi Jambi namun pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Jambi menjadi jumlah miskin terbanyak di Provinsi Jambi. Fenomena ini lebih disebabkan arus urbanisasi ke Kota Jambi dalam kurun waktu 17 tahun cenderung meningkat karena Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang mempunyai peranan sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum dan perekonomian

sehingga Kota Jambi menjadi tujuan urbanisasi penduduk yang ada di hinterland Kota Jambi.



Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2002-2019

Gambar 1. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi, 2002-2019

Namun jika ditinjau lebih lanjut persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2002-2019 cenderung menurun dari 13,18% pada tahun 2002 menurun menjadi 7,6% pada tahun 2019. Dengan turunnya persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi mengindikasikan bahwasanya program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2002-2019 berhasil menurunkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi.

Pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik juga memungkinkan penduduk yang miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat hal terpenting dari mereka ialah tenaga mereka. Kemiskinan juga menghambat mereka untuk mengkonsumsi nutrisi bergizi dan dengan rendahnya tingkat pengetahuan yang mereka miliki, mereka kurang bisa memelihara lingkungan yang menyehatkan. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi, kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang didapat mereka peroleh.

Perluasan kesempatan bersekolah pada semua tingkat pendidikan telah dapat mendorong tenaga kerja yang lebih produktif, melalui penciptaan kemampuan kerja yang lebih produktif dan penyediaan lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan mereka dan terhindar dari kemiskinan (Kamaluddin,1997).

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar untuk menjadi focus dan perhatian utama terhadap pemerintah. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, sanitasi (air bersih), pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah seperti Program Keluarga Harapan, Raskin/Rastra, Jaminan Kesehatan (BPJS), jaminan Pendidikan dan lain sebagainya, namun dari sekian banyaknya program tersebut belum dapat mampu menuntaskan kemiskinan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin menunjukkan cenderung mengalami penurunan, jumlah kesempatan kerja juga cenderung mengalami

peningkatan. Kesempatan kerja, rata-rata lama sekolah dan inflasi cenderung meningkat. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang negatif antara kesempatan kerja dan pendidikan dengan kemiskinan di Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di jelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masih tingginya kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jambi, dalam tesis yang berjudul “**Determinan kemiskinan di Provinsi Jambi**”.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu data terdiri dari dua bagian yaitu: *time series*. Data *time series* adalah data tahunan yang dimulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 adalah Provinsi Jambi.

Sumber data dari Badan Statistik Provinsi Jambi dan instansi terkait yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun data yang digunakan bersumber dari data Provinsi Jambi tentang kemiskinan, inflasi, PDRB, rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi (UMP) Provinsi Jambi.

Model analisis data

Analisis deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata, tabel-tabel, gambar-gambar dan sebagainya yang dibuat atau dihitung dengan program aplikasi SPSS 24 maupun Microsoft Excel.

Analisis regresi berganda

Untuk menjawab tujuan kedua model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta D_1 + e$$

Dimana:

Y =Tingkat kemiskinan

X1 =Inflasi

X2 =Laju pertumbuhan PDRB

X3 =Rata-rata lama sekolah

X4 =Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

X5 =Upah minimum provinsi (UMP)

D1 =Dummy variabel (Jamkesda), D = 0 (2002-2009), D = 1 (2010-2019)

β_0 =Besarnya tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada saat variabel lain diasumsikan tidak ada

β_1 =Besarnya pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi

β_2 =Besarnya laju pertumbuhan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi

β_3 =Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi

β_4 =Pengaruh TPAK terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi

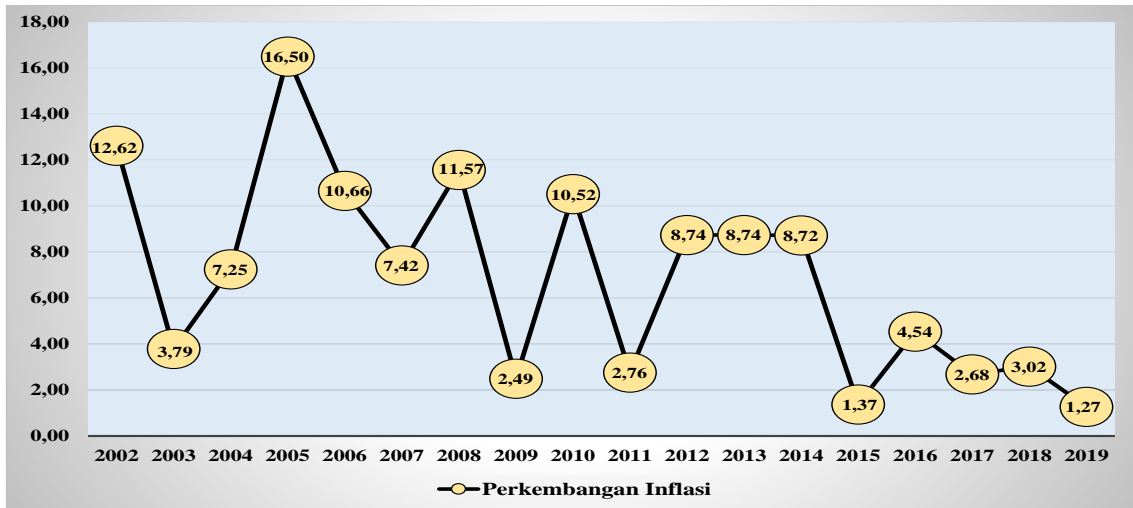
β_5 =Pengaruh UMP terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi

β = Dummy Jamkesda terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi

e =*Error term* (variabel pengganggu)

Kondisi kemiskinan Provinsi Jambi

Inflasi yang terjadi di Kota Jambi pada periode waktu 2002-2019 cenderung fluktuatif. Dengan angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 16,50% dan dalam kurun waktu tersebut inflasi terkecil terjadi pada tahun 2019 dengan angka inflasi sebesar 1,27%.

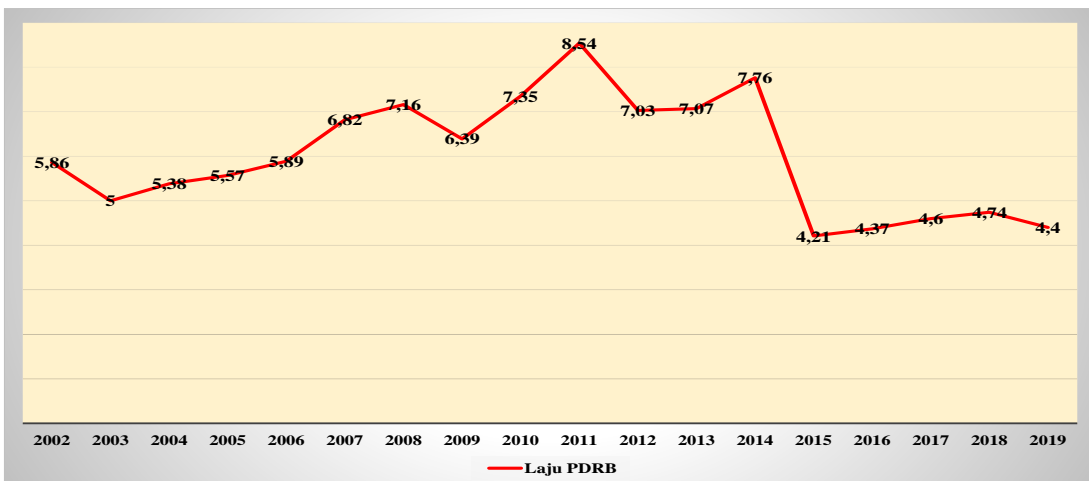


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2003-2020

Gambar 2. Perkembangan inflasi Provinsi Jambi Tahun 2002-2019

Kondisi pertumbuhan PDRB

Jumlah PDRB di Provinsi Jambi pada kurun waktu 2002-2019 cenderung fluktuatif seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini. Laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Jambi dapat terlihat pada gambar grafik dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2002-2019

Gambar 3. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2002-2019

Kondisi rata-rata lama sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi pada tahun 2002 adalah 7,40 tahun meningkat menjadi 8,45 tahun di tahun 2019. Dengan cenderung meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi mengindikasikan semakin tinggi

pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di Provinsi Jambi sehingga kondisi tersebut juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi dari tahun 2002 sampai 2019 cenderung fluktuatif, dan pada tahun 2006 mengalami penurunan dari 68,69% pada tahun 2005 menurun menjadi 64,26% pada tahun 2006 . Dan meningkat kembali pada tahun 2007 menjadi 65,18% sampai dengan tahun 2010 kondisi partisipasi angkatan kerja cenderung stabil meskipun mengalami penurunan yang tidak terlalu banyak.

Upah minimum provinsi (UMP)

Upah minimum rata-rata provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2002 sebesar Rp. 304.000 meningkat menjadi Rp. 2.400.00 pada tahun 2019. Terjadi peningkatan upah minimum sebesar Rp. 2.096.000,- dalam kurun waktu 18 tahun. Untuk lebih jelasnya perkembangan upah minimum di Proivnsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perkembangan upah minimum Provinsi Jambi Tahun 2002-2019

No	Tahun	Upah Minimum Provinsi	Kebutuhan Hidup Layak	Kenaikan UMP (Rupiah)	Persentase Kenaikan UMP (%)	Ratio UMP/KHL
1.	2002	304.000	-	-	28,29	-
2.	2003	390.000	458.823	65.000	20,00	85,00
3.	2004	425.000	440.368	35.000	8,97	96,51
4.	2005	485.000	494.897	60.000	14,12	98,00
5.	2006	563.000	571.167	78.000	16,08	98,57
6.	2007	658.000	693.726	95.000	16,87	94,85
7.	2008	724.000	734.168	66.000	10,03	98,62
8.	2009	800.000	918.000	76.000	10,50	87,15
9.	2010	900.000	970.662	100.000	12,50	92,72
10.	2011	1.028.000	1.027.791	128.000	14,22	100,02
11.	2012	1.142.500	1.143.576	114.500	11,14	99,91
12.	2013	1.300.000	1.321.572	157.500	13,79	98,37
13.	2014	1.502.230	1.502.227	202.230	15,56	100
14.	2015	1.710.000	1.708.174	20.777	13,83	100,11
15.	2016	1.906.650	1.834.389	196.650	11,5	103,94
16.	2017	2.063.948	-	157.298	8,25	-
17.	2018	2.243.719	-	179.771	8,71	-
18.	2019	2.400.000	-	156.281	6,97	-

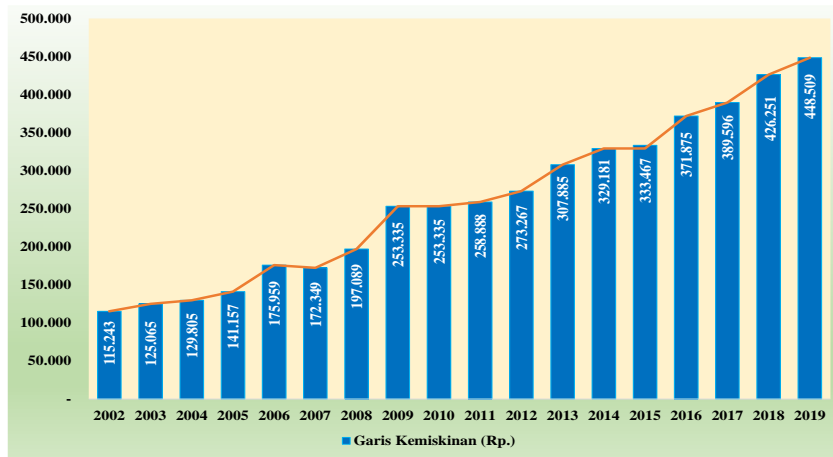
Sumber: BPS Provinsi Jambi 2002-2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis perkembangan kemiskinan di Provinsi Jambi

Dalam melihat perkembangan kemiskinan di Provinsi Jambi salah satu indikator yang digunakan adalah garis Kemiskinan. Trend garis Kemiskinan pada periode 2002-

2019 menggambarkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jambi. Pada periode 2002-2019 terjadi peningkatan garis Kemiskinan di Provinsi Jambi dari Rp. 115.243,- meningkat menjadi Rp. 448.509 pada tahun 2019. Keadaan peningkatan garis Kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode waktu 2002-2019 dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini



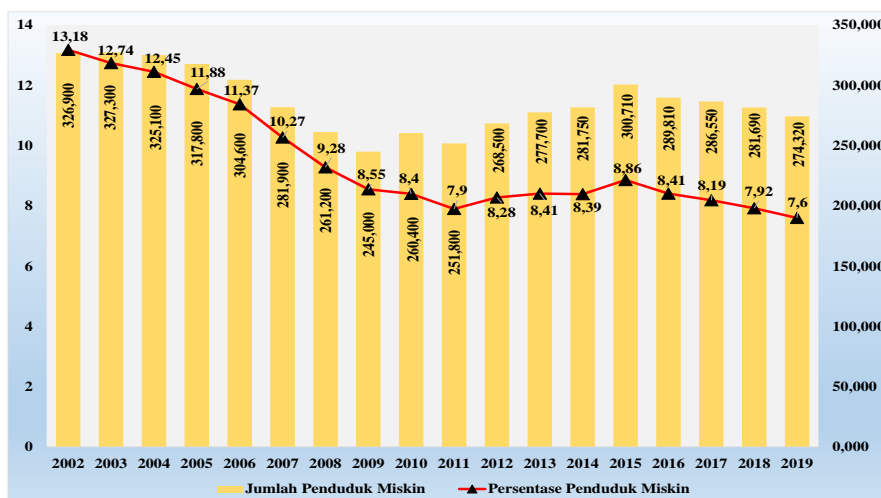
Sumber: BPS Provinsi Jambi 2002-2019

Gambar 4. Perkembangan garis kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2002-2019

Peningkatan garis kemiskinan di Provinsi Jambi dalam periode waktu 2002-2019 sebesar 74,31% dalam kurun waktu 17 tahun dengan laju perkembangan garis kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode waktu 2002-2019 adalah sebesar 8,60% pertahun

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada tahun 2002 sebesar 326.900 orang turun menjadi 274.320 orang pada tahun 2019. Perubahan jumlah penduduk miskin yang terjadi di Provinsi Jambi dalam periode waktu 2002-2019 tentunya sejalan dengan pola perubahan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2002 persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi adalah sebesar 13,18% dari total penduduk Provinsi Jambi tahun 2002 turun menjadi 7,6% dari total penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2019.



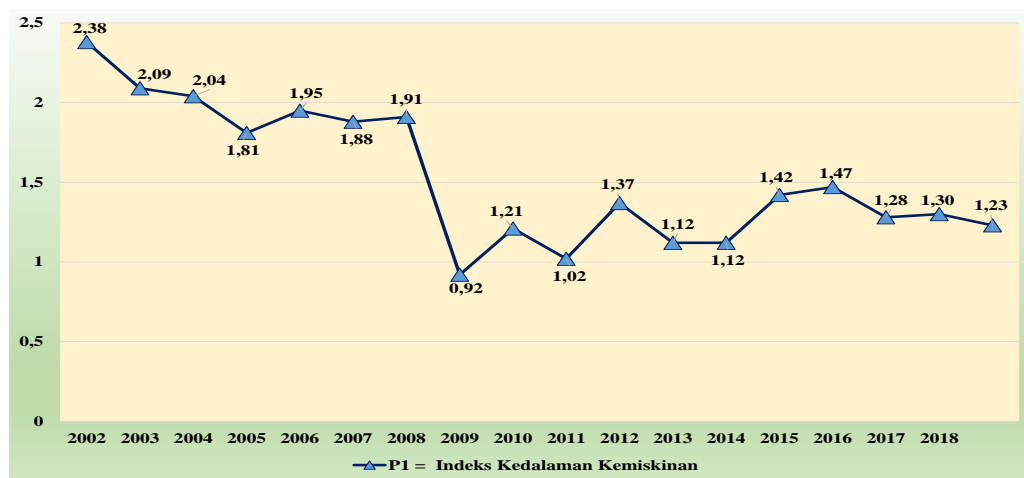
Gambar 5. Jumlah dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2002-2019

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2002-2019

Dari gambar Gambar 5 terlihat trend penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dalam periode waktu 2002-2019. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dari tahun 2014 sebesar 281.750 orang (8,39%) meningkat menjadi 300.710 orang (8,36%) atau terjadi peningkatan sebanyak 18.960 orang atau meningkat sebesar 6,73%.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

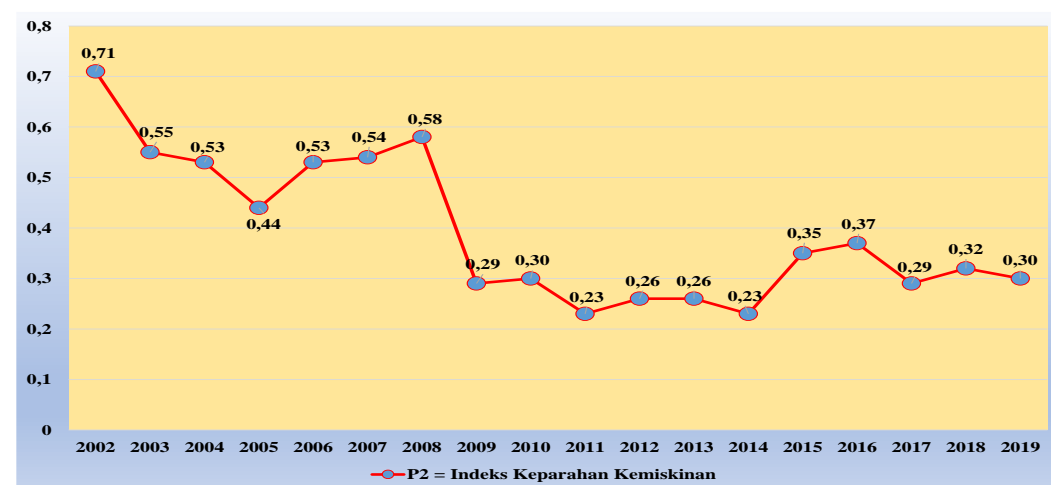
Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode 2002-2019 cenderung fluktuatif. Namun secara umum, indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jambi turun dari 2,38 pada tahun 2002 menurun menjadi 1,23 pada tahun 2019. Pada periode tahun 2002 hingga tahun 2019 indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jambi turun sebesar 1,15 poin.



Sumber: BPS Provinsi Jambi 2002-2019

Gambar 6. Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2002-2019

Angka indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode waktu 2002-2019 cenderung fluktuatif, namun secara umum angka indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jambi menurun. Pada tahun 2002 angka indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jambi adalah sebesar 0,71 menurun menjadi 0,30 pada tahun 2019.



Sumber: BPS Provinsi Jambi 2002-2019

Gambar 7. Indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2002-2019

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan

Uji hipotesis

Hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan pada model menunjukkan angka 0,916 yang artinya 91,60% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, dan sisanya sebesar 8,40% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Kemudian hasil pada uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hal ini dikarenakan hasil uji F menunjukkan angka $0,000000 < 0,05$. Hasil uji t dapat dijelaskan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan koefisien sebesar 0,100, nilai t-statistik sebesar 2,124 dan memiliki probabilitas sebesar 0,05 ($< 0,05$). Variabel laju pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan nilai koefisien sebesar -0,709, nilai t-statistik sebesar -3,803 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,003 ($< 0,05$). Variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0,02 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Selanjutnya UMP memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0363 ($< 0,05$) dan koefisien sebesar 0,263 yang berarti variabel UMP signifikan dan mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Dummy

Terdapat variabel dummy pada model penelitian. Dummy 1 (D1) adalah Program Jaminan Kesehatan Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2010. Dummy 1 (D1) memiliki probabilitas sebesar 0,15 ($> 0,05$) yang berarti variabel D1 signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode tahun 2002-2019 cenderung menurun. Pada tahun 2002 tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi sebesar 13,18% menurun menjadi 7,60% pada tahun 2019. Sementara indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Jambi cenderung fluktuatif pada periode tahun 2002-2019. Sementara Garis Kemiskinan Provinsi Jambi memiliki trend yang terus meningkat pada periode tahun 2002-2019, pada tahun 2002 Garis Kemiskinan Provinsi Jambi sebesar Rp. 115.243 meningkat menjadi Rp, 448.509 pada tahun 2019.

Faktor-Faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode waktu 2002-2019 adalah Inflasi, Laju Pertumbuhan PDRB, Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jaminan Kesehatan Daerah

Saran

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan kebijakan pengentasan kemiskinan pada: Peningkatan Laju Ekonomi (PDRB), Peningkatan Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi penduduk miskin dan Peningkatan Wajib Belajar hingga 12 tahun melalui program Pendidikan gratis bagi penduduk miskin. Kebijakan pengentasan kemiskinan melalui Jamkesda dan Pendidikan gratis merupakan kebijakan non ekonomi yang perlu dilaksanakan.

Sedangkan perluasan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk perlu dilaksanakan pula agar ekonomi penduduk miskin dapat di tingkatkan. Oleh karena itu,

perlu juga pemerintah daerah menumbuhkembangkan ekonomi penduduk miskin melalui usaha produktif dan kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amijaya, Tisna D. (2008). *Analisis pengaruh disparitas pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia*. Tesis: Jakarta.
- Arius Jonaidi. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi*. 1(1), 140-164.
- Analisa, Lucky Wulan. (2011). *Analisis pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Disperindag Kota Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas Diponegoro: Semarang.
- Arsyad,L. (2016). *Ekonomi pembangunan*. Edisi Kelima. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Basri Faisal, Munandar Haris. (2009). Lanskap ekonomi Indonesia: kajian dan renungan terhadap masalah-masalah struktural, transformasi baru dan prospek perekonomian Indonesia, Kencana: Jakarta
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. UNDIP: Semarang
- Hadikusomo, Kunaryo. (2000). *Pengantar pendidikan*. IKIP Semarang: Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi pembangunan teori, masalah dan kebijakan*, UPP-AMP YKPN: Yogyakarta
- Noor, Juliansyah. (2014). *Analisis data penelitian ekonomi & manajemen*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia: Jakarta
- Juliansyah Noor. (2014). *Analisis data penelitian ekonomi & manajemen*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia: Jakarta
- Oktaviani, Y. (2009). *Pengaruh pendidikan dan masa kerja terhadap kedisiplinan karyawan di SMK Muhammadiyah Surakarta*. Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta: Jawa Tengah
- Ravi Dwi Wijayanto. (2010). *Analisis pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Riduwan. (2004). *Metode riset*, Rineka Cipta: Jakarta
- Sahdan, G. (2004). *Kemiskinan Desa, menanggulangi kemiskinan desa, jurusan pemerintahan*, STPMD APMD: Yogyakarta.
- Saldanha. (1998). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan*. Institut Pertanian Bogor: Bogor
- Sajogyo. (1977). *Golongan miskin dan partisipasi dalam pembangunan desa*. Prisma: Bogor
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar kebijakan publik*. UNY Press: Yogyakarta
- Sumanta, Jaka. (2005). Fenomena lingkaran kemiskinan: analisis ekometrika regional. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 1(2).